

Pengaruh Tingkat Nisbah dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah di Provinsi Jambi

Heri Prayoga^{1*}, Syaparuddin Syaparuddin²

^{1,2} Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jl. Raya Jambi – Muara Bulian KM. 15, Muaro Jambi, Jambi

Diterima: 30-07-2022	Direvisi: 09-08-2022	Disetujui: 16-08-2022	Dipublikasi: 26-08-2022
----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract

The purpose of this research is to analyze: 1). ratio development and inflation rate in Jambi Province; 2). the influence of ratios and inflation rates on working capital financing of Islamic banking in Jambi Province. The data used is secondary time series data from 2000-2015. Data sourced from Jambi Province Islamic Banking Statistics and Indonesian Economic and Financial Statistics. Data were analyzed descriptively and using multiple linear regression models. The study's results found that the average level of financing ratios for Islamic banking in Jambi Province during 2000-2015 was 15.89 percent, and the average inflation rate was 7.36 percent. The average development of working capital financing is 42.54 percent annually. The inflation rate and the profit-sharing rate have no significant effect on the working capital financing of Islamic banking in Jambi Province.

Keywords: *financing, inflation, Islamic banking, working capital*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). perkembangan tingkat nisbah dan inflasi di Provinsi Jambi; 2). pengaruh tingkat nisbah dan inflasi terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder time series dari tahun 2000-2015. Data bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Provinsi Jambi dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat nisbah pembiayaan perbankan syariah Provinsi Jambi selama tahun 2000-2015 sebesar 15,89 persen, dan rata-rata inflasi sebesar 7,36 persen. Perkembangan rata-rata pembiayaan modal kerja sebesar 42,54 persen pertahunnya. Baik tingkat inflasi maupun tingkat nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi.

Kata kunci: inflasi, modal kerja, pembiayaan, perbankan syariah

Pendahuluan

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, giro dan lainnya. Selanjutnya dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit, pinjaman atau pembiayaan.

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang membutuhkan/pengguna dana (Badriyah, 2009). Oleh karenanya, agar peran bank dapat

* Penulis korespondensi
Email: heriprayoga3@yahoo.co.id

optimal menggerakkan perekonomian, bank yang beroperasi secara efisien baik dalam skala makro dan mikro.

Sebagai negara dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kebutuhan lembaga keuangan syariah menjadi kebutuhan yang esensial dalam mengerahkan dana masyarakat. Bank dan lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang didasarkan prinsip syariah yaitu berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadits dan sunnah Nabi (Ascarya & Yumanita, 2005). Penerapan penghimpunan dana pada Bank Syariah menggunakan prinsip Wadi'ah dan Mudharaba, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Penerapan penyaluran dana (pembiayaan) pada Bank Syariah menggunakan prinsip jual-beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Pembiayaan ini ditujukan untuk usaha atau kegiatan yang bermanfaat, seperti peningkatan usaha, modal awal dan nilai jual. Salah satu bentuk pembiayaan yang memiliki peran dalam pembiayaan usaha adalah pembiayaan modal kerja.

Pada tahun 2010 jumlah pembiayaan modal kerja yang diberikan pihak perbankan syariah di Provinsi Jambi sejumlah Rp 0,712 Miliar kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 1,194 Miliar atau telah terjadi peningkatan menjadi 67,70 persen. Kemudian di tahun 2012 jumlah pembiayaan modal kerja mengalami peningkatan kembali sebesar 41,88 persen. Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan modal kerja perbankan syariah mencapai Rp2,051 Miliar serta pada tahun 2014 jumlah pembiayaan modal kerja meningkat sebesar 11,41 persen menjadi sebesar Rp 2,285 Miliar. Hingga tahun 2015 jumlah pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi yang telah direalisasikan sejumlah Rp 2,618 Miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2015).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mulai berkembang dengan pesat mulai dari skala mikro sampai skala makro, seperti koperasi syariah, BMT, BPR Syariah dan Bank Syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut telah mendapat respon positif dari masyarakat, terlihat dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat menyimpan dananya pada lembaga tersebut. Dana yang dihimpun lembaga keuangan syariah tersebut kemudian disalurkan sebagai pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk modal kerja dan investasi.

Dalam konteks bank/lembaga keuangan syariah, pertimbangan utama permintaan pembiayaan besaran nisbah bagi hasil (Sholahuddin & Hakim, 2008). Nisbah bagi hasil terkait dengan metode pembayaran angsuran. Angsuran mencakup angsuran harga beli, harga pokok dan margin keuntungan. Pembayaran angsuran dapat dihitung dengan menggunakan metode margin keuntungan, keuntungan rata-rata, keuntungan flat. Sistem bagi hasil ditetapkan dengan nisbah tertentu seperti 40:60, 30:70, 50:50, yang sesuai dengan akad pembiayaannya (Muhammad, 2005).

Beberapa ahli ekonomi menyatakan, manusia pada prinsipnya lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sekarang dibandingkan kebutuhan masa yang akan datang. Meskipun, ajaran Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaan tersebut tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Ajaran Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil dalam bentuk *sharing the risk and profit* secara bersama (Antonio, 2003).

Tingkat bagi hasil pada bank umum syariah selama tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Selama tahun ini tingkat bagi hasil terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 20,69 persen, sementara tingkat bagi hasil terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 14,09 persen. Nisbah bagi hasil tersebut diperoleh atas dasar kesepakatan dan persetujuan antara mitra bank dan pihak perbankan syariah. (Statistik Perbankan Syariah, 2015).

Selain tingkat nisbah, berdasarkan beberapa temuan penelitian sebelumnya, inflasi juga menjadi salah satu faktor penentu dari permintaan pembiayaan modal kerja (Indriani & Priyanto, 2018; Firman dkk., 2018; Jayanti & Deky, 2016). Inflasi secara definisi adalah

kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditi dan jasa.

Inflasi berdampak pada ketidakstabilan daya beli masyarakat. Menurut Karim (2010) dan inflasi yang tinggi juga mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Hal ini pada tahap selanjutnya menurut Muttaqiena, (2013) mengurangi ketersediaan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada calon debiturnya.

Inflasi di Provinsi Jambi selama Tahun 2010-2015 terus berfluktuasi. Inflasi tertinggi selama tahun ini terjadi pada tahun 2010 dengan inflasi sebesar 10,12 persen. Sementara inflasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 1,37 persen. Inflasi di Provinsi Jambi terutama bersumber dari kenaikan biaya transportasi, komunikasi, dan harga bahan bakar minyak (BPS Provinsi Jambi, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). perkembangan tingkat nisbah dan inflasi di Provinsi Jambi; 2). pengaruh tingkat nisbah dan inflasi terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi.

Metode

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sekunder runtun waktu (*time series*) dari tahun 2000-2015. Data bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Provinsi Jambi terbitan Bank Indonesia dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia terbitan Bank Indonesia.

Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif dan analisis regresi berganda. Model regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 NBH + \beta_2 Inf + e \quad (1)$$

Dimana:

Y	: Pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi
α	: Konstanta
β_1, β_2	: Koefisien regresi
NBH	: Nisbah bagi hasil
Inf	: Inflasi di Provinsi Jambi
e	: Standar error

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah di Provinsi Jambi

Perkembangan pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2015 secara terperinci diberikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa secara rata-rata pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi selama Tahun 2000 – 2015 adalah sebesar Rp 0,744 miliar pertahun. Selama periode tersebut, pembiayaan modal kerja perbankan syariah secara kontinu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 42,54 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2004 sebesar 150,00 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2006 sebesar 1,53 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah di Provinsi Jambi, Tahun 2000-2015

Tahun	Pembiayaan (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)
2000	0,021	
2001	0,023	9,52
2002	0,036	56,52
2003	0,048	33,33
2004	0,12	150,00
2005	0,131	9,17
2006	0,133	1,53
2007	0,145	9,02
2008	0,275	89,66
2009	0,411	49,45
2010	0,712	73,24
2011	1,194	67,70
2012	1,694	41,88
2013	2,051	21,07
2014	2,285	11,41
2015	2,618	14,57
Rata-rata	0,744	42,54

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Provinsi Jambi (diolah)

Perkembangan Tingkat Nisbah Perbankan Syariah di Provinsi Jambi

Tingkat nisbah perbankan syariah sangat tergantung dari tingkat suku bunga (SBI) dan akad dari mitra bank atau nasabah yang meminta pembiayaan dan pihak perbankan. Tingkat nisbah perbankan syariah di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rata-rata tingkat nisbah perbankan syariah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan 0,33 persen pertahunnya. Peningkatan tingkat nisbah tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 6,29 persen, kemudian diikuti oleh tingkat nisbah di tahun 2007 dan tahun 2004, berturut-turut sebesar 3,20 persen dan 2,88 persen. Sementara itu tingkat nisbah mengalami penurunan di tahun 2005 yaitu sebesar 4,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara terperinci perkembangan tingkat nisbah di Provinsi Jambi selama Tahun 2000 – 2015 diberikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Tingkat Nisbah di Provinsi Jambi Selama Tahun 2000-2015

Tahun	Tingkat Nisbah (%)	Perkembangan
2000	13,03	-
2001	13,16	0,13
2002	13,22	0,06
2003	14,71	1,49
2004	17,59	2,88
2005	12,75	-4,84
2006	13,73	0,98
2007	16,93	3,2
2008	19,38	2,45
2009	19,11	-0,27
2010	17,39	-1,72
2011	16,05	-1,34
2012	14,09	-1,96
2013	14,40	0,31
2014	20,69	6,29
2015	17,94	-2,75
Rata-rata	15,89	0,33

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Provinsi Jambi (diolah)

Perkembangan Inflasi di Provinsi Jambi

Perkembangan inflasi Provinsi Jambi dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir, mulai dari tahun 2000-2016 sangat fluktuatif. Terlihat bahwa inflasi di Provinsi Jambi tahun 2002 merupakan inflasi dengan peningkatan tertinggi yaitu sebesar 11,14 persen. Sementara inflasi pada tahun 2012 merupakan inflasi dengan peningkatan terendah. Di sisi lain inflasi mengalami penurunan tertinggi di tahun 2013 yaitu sebesar 8,83 persen (Tabel 3). Inflasi dengan peningkatan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada sandang dan transportasi.

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dapat dikelompokkan atas: 1) *Moderated inflation*; dimana kenaikan tingkat harga yang lambat, 2). *Gallop inflation*; inflasi terjadi pada tingkat 20% sampai 200% per tahun; 3) *Hyper inflation*; inflasi terjadi pada tingkat yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun (Karim, 2007). Mengacu pada hal tersebut, inflasi di Provinsi Jambi masih tergolong *moderated inflation*.

Tabel 3. Perkembangan Inflasi di Provinsi Jambi Selama Tahun 2000-2015

Tahun	Inflasi (%)	Perkembangan (%)
2000	8,40	-
2001	1,48	-6,92
2002	12,62	11,14
2003	3,79	-8,83
2004	7,25	3,46
2005	16,50	9,25
2006	10,66	-5,84
2007	7,42	-3,24
2008	11,16	3,74
2009	2,50	-8,66
2010	10,12	7,62
2011	2,79	-7,33
2012	4,16	1,37
2013	8,74	4,58
2014	8,72	-0,02
2015	1,37	-7,35
Rata-Rata	7,36	-0,47

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Pengaruh Tingkat Nisbah dan Inflasi terhadap Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah Provinsi Jambi

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya diharapkan bahwa tingkat nisbah dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi. Maka model yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda. Secara terperinci, estimasi pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi diberikan pada Tabel 4.

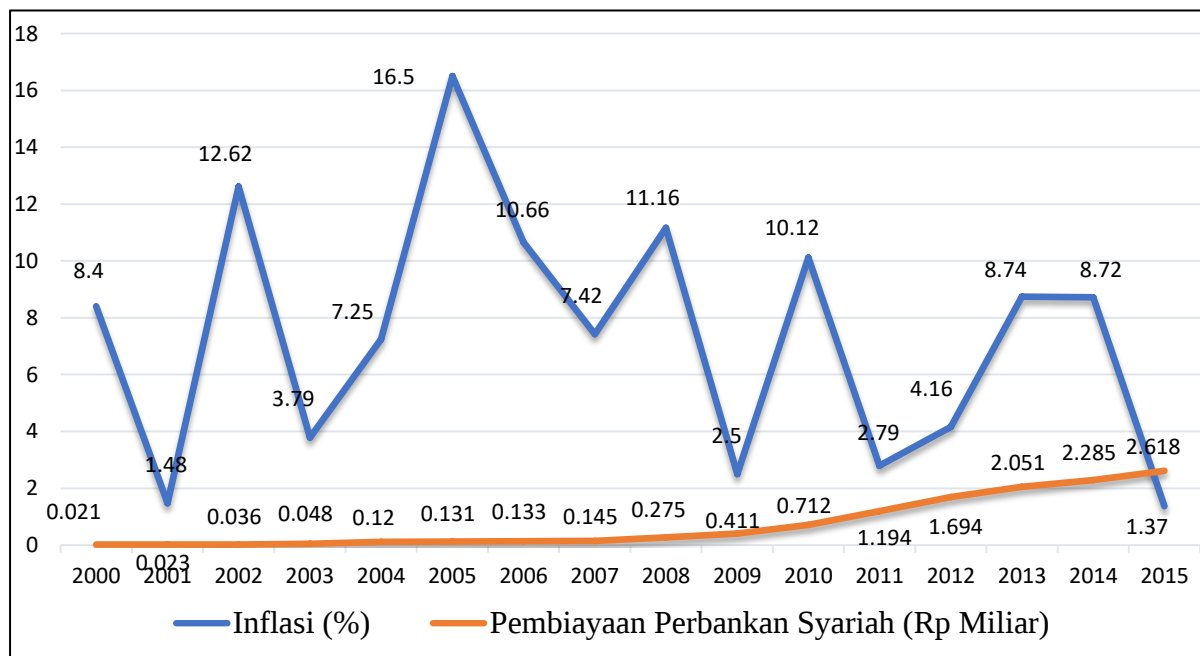
Berdasarkan Tabel 1 diperoleh F_{hitung} sebesar 1.542561 dengan probabilitas $0,250538 > \alpha = 0,1$. Dengan demikian secara simultan tingkat nisbah dan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi selama tahun 2000-2015. Pengujian secara parsial juga menunjukkan bahwa inflasi dan tingkat nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan ($prob\ t_{hitung} > 0,1$) terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah.

Tabel 4. Estimasi Pembiayaan Modal Kerja Perbankan Syariah di Provinsi Jambi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-724.9840	1572.420	-0.461063	0.6524
INFLASI_PROVINSI_JAMBI__	-49.22768	53.22284	-0.924935	0.3719
TINGKAT_NISBAH_BAGI_HASI	115.2378	90.07761	1.279317	0.2231
R-squared	0.191800	Mean dependent var		743.5708
Adjusted R-squared	0.067461	S.D. dependent var		914.9496
S.E. of regression	883.5490	Akaike info criterion		16.57313
Sum squared resid	10148564	Schwarz criterion		16.71799
Log likelihood	-129.5850	Hannan-Quinn criter.		16.58055
F-statistic	1.542561	Durbin-Watson stat		0.436483
Prob(F-statistic)	0.250538			

Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi sejalan dengan temuan penelitian Ansari (2017), Wahiddudin (2018), Laelasari (2019), Dahlan (2014) dan Nafis & Sudarsono (2021). Namun demikian temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Indriani & Priyanto (2018), Firman dkk (2018), Jayanti & Deky (2016) dan Rifai, dkk. (2017 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara inflasi terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Fakta tidak berpengaruhnya inflasi dengan pembiayaan modal kerja perbankan syariah juga dapat dilihat dari Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa inflasi dari tahun 200-2015 cenderung berfluktuasi sedangkan tingkat nisbah bagi hasil cenderung meningkat. Begitu pula, ditahun 2010, inflasi menunjukkan angka sebesar 10,12 persen dan pembiayaan perbankan syariah meningkat menjadi sebesar Rp 0,712 Miliar atau mengalami peningkatan 73,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga tahun 2015 inflasi Provinsi Jambi sebesar 1,37 persen, inflasi terendah selama waktu penelitian dan pembiayaan perbankan syariah meningkat menjadi sebesar Rp 2,618 Miliar.

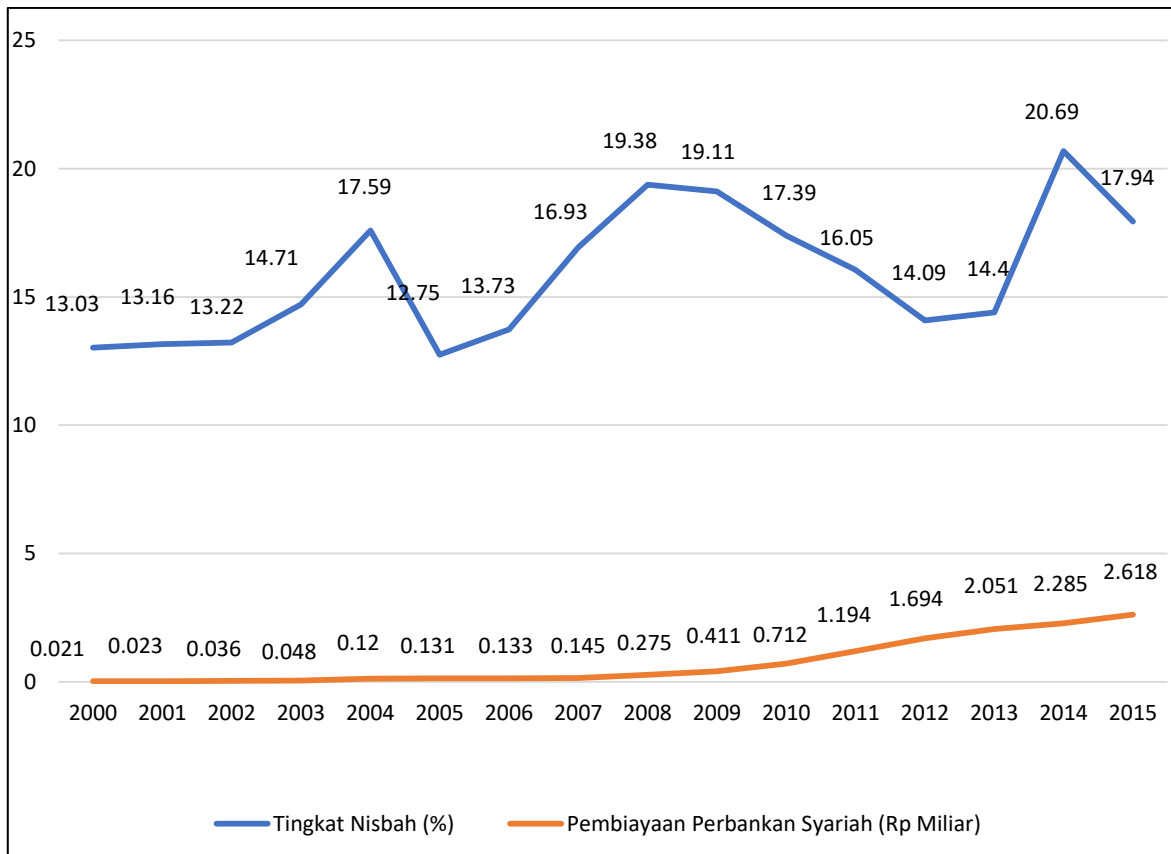
**Gambar 1.** Keterkaitan Inflasi Dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Provinsi Jambi Selama Tahun 2000-2015

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Provinsi Jambi (diolah)

Dalam kaitannya dengan peningkatan pembiayaan syariah, berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan inflasi tidak diikuti dengan peningkatan atau penurunan pembiayaan syariah. Inflasi di Provinsi Jambi yang sangat berfluktuatif tidak mempengaruhi pembiayaan syariah yang terus bertambah di Provinsi Jambi. Pada tahun 2000 inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok sebesar 8,4 persen dan pembiayaan sebesar Rp 0,021 Miliar, pada tahun 2005 inflasi mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,5 persen dan pembiayaan tetap meningkat menjadi sebesar 0,131 Miliar.

Selanjutnya, tingkat nisbah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Jauhariyah, & Amin, (2021). Meskipun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Hidayat (2016), Indriani & Priyanto (2018), Fathimah (2017) dan Giannini (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh tingkat nisbah berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah

Fakta tidak signifikannya pengaruh tingkat nisbah terhadap pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah di Provinsi dapat dijelaskan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 besarnya peningkatan tingkat nisbah cenderung tetap diikuti peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Tingkat nisbah di tahun 2000 sebesar 13,03 persen sedangkan pembiayaan syariah sebesar Rp 0,021 Miliar. Pada tahun 2004 tingkat nisbah meningkat menjadi sebesar 17,59 persen, pembiayaan syariah tetap meningkat menjadi sebesar Rp 0,120 Miliar. Begitu hingga tahun 2016 tingkat nisbah meningkat menjadi sebesar 20,69 persen dan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan 11,41 persen di bandingkan tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp 2,285 Miliar.



Gambar 2. Keterkaitan Tingkat Nisbah dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Provinsi Jambi Selama Tahun 2000-2015

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Provinsi Jambi dan Bank Indonesia (diolah)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Rata-rata tingkat nisbah pembiayaan perbankan syariah Provinsi Jambi selama tahun 2000-2015 sebesar 15,89 persen, sedangkan rata-rata inflasi sebesar 7,36 persen, dan pertumbuhan rata-rata pembiayaan modal kerja sebesar 42,54 persen pertahunnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja perbankan syariah di Provinsi Jambi. Dapat disimpulkan bahwa motif masyarakat meminta pembiayaan di perbankan syariah di Provinsi Jambi adalah karena alasan lain diantaranya sistem syariah yang digunakan dan alasan religiusitas dan keadilan sistem bagi hasil.

Kenaikan bagi hasil oleh bank umum syariah tidak mengurangi minat pengambilan akad pembiayaan di bank umum syariah. Kenaikan yang terjadi masih dianggap wajar karena tidak mengurangi jumlah pembiayaan. Apabila bagi hasil yang ditawarkan tinggi, maka masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya di bank syariah dan pembiayaan modal kerja syariah juga semakin meningkat.

Saran

Inflasi di daerah harus terus di kendalikan, agar pembiayaan perbankan tetap dapat memberikan dampak bagi peningkatan aktifitas usaha yang dilakukannya, karena kenaikan harga masih dianggap wajar dan sesuai dengan geliat usaha. Tingkat bagi hasil diharapkan harus sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh mitra yang meminta dan bank yang memberikan pembiayaan pada mitra atau masyarakat, karena tingkat pengembalian dapat terjaga dan ketersediaan dana juga dapat terus terjaga.

Daftar Pustaka

- Ansari, L.P. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Bukopin). *Jurnal E- KOMBIS*, 3(1), 93-103.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktek*. Yogyakarta: UGM Pres
<https://doi.org/10.35308/ekombis.v3i1.407s>
- Ascarya, A & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Badriyah, N. (2009). Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 183 – 208.
<https://doi.org/10.22219/jep.v7i2.3615>
- Bank Indonesia.(2015). *Statistik Perbankan Syariah*. <http://www.bi.go.id/web/id/Syariah/>. di unduh pada Tanggal 31 Juni 2015 Pukul 15:58
- Bank Indonesia.(2015). *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. <http://seki-bi.com>. diunduh pada Tanggal 31 Juli 2015 Pukul 13:03
- BPS. (2015). *Jambi dalam Angka*. Jambi: BPS
- Dahlan, R. (2014). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 13(2), 104 - 117
- Fathimah, V. (2017). Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman*, 5(1), 41 – 52

- Firman, A., Hadiyanto, F. & Fauzan, A. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Syariah di Indonesia 2004-2013. *Jurnal of Economic and Entrepreneurship (Econeur)*, 1(1), 5-8
- Giannini, N.G. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 96 – 103. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i1.1178>
- Hidayat, Y.R. (2016). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah. *Ekspansi*, 8(2), 187 – 200
- Indriani, S. & Priyanto, T. (2018). Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 91–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3840768>
- Jauhariyah, N. A., & Amin, A. S. (2021). Analisis Nisbah dan Angsuran Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BriSyariah KCP Genteng Banyuwangi. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i1.781>
- Jayanti, S., & Deky, D. (2016). Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 86-105. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1026>
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Laelasari, W. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 Di BPRS AL-Masoem. *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 109 - 118
- Muhammad, M. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jogjakarta: Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muttaqiena, A. (2013). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 175 – 186. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1971>
- Nafis, R.K. & Sudarsono, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 164-173. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Rifai, S.A., Susanti, H. & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Muqtasid*, 8(1), 13 - 27
- Sholahudin, M. & Hakim, L. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Wahiddudin, M. (2018). Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017. *Al Amwal*, 1(1), 76 - 89.



© 2022 oleh penulis. Pemegang Lisensi JEA, Indonesia. Artikel ini merupakan artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)